

**PENGARUH ANGKA MELEK HURUF DAN UPAH MINIMUM  
TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DAN INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI**

**Dede Edwin Megantara<sup>1</sup>  
Made Kembar Sri Budhi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
E-mail : [dedeedwin30@yahoo.com](mailto:dedeedwin30@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter yang paling populer saat ini adalah indeks pembangunan manusia yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator komposit yang mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai sebagai cerminan kemampuan dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh angka melek huruf dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan 54 jumlah pengamatan, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis jalur. Hasil analisis menunjukkan angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, angka melek huruf berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tingkat pengangguran bukan sebagai variabel *intervening* dari variabel angka melek huruf dan upah minimum terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali.

**Kata kunci:** angka melek huruf, upah minimum, pengangguran, indeks pembangunan manusia

**ABSTRACT**

*Development success is measured by some of the most popular parameters through the quality of education, health and economic levels. The human development index is a composite indicator that measures three main dimensions of human development which are valued as a reflection of basic human capabilities, namely longevity and health, knowledge and a decent life. This study aims to analyze the effect of literacy and minimum wage rates on unemployment rates and district / city human development index in Bali Province. This study uses secondary data with 54 number of observations, then analyzed using path analysis. The analysis shows the literacy rate has negative significant effect on the unemployment rate, the minimum wage has negative significant effect on the unemployment rate, the literacy rate has positive significant effect on the human development index, the minimum wage has positive significant effect on the human development index and the unemployment rate has an effect positive and not significant to the district / city human development index in the Province of Bali. The unemployment rate is not an intervening variable from the literacy rate variable and the minimum wage to the district / city human development index in the Province of Bali.*

**keywords:** literacy rate, minimum wage, unemployment, human development index

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan standar hidup (*level of living*) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Penciptaan berbagi kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (*selfesteem*) setiap orang melalui pembentukan sistem sosial, politik dan ekonomi serta meningkatkan kebebasan (*freedom*) setiap orang dalam memilih berbagi variabel pilihan yang ada. Pembangunan diharapkan dapat menciptakan pemerataan, keadilan, tidak adanya ketimpangan pembangunan, baik antara daerah, maupun warga masyarakat, memberdayakan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan ekonomi. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas diperlukan upaya-upaya meningkatkan pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan. Pentingnya peran pemerintah terutama dalam meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dan meningkatkan produktivitas manusia. Realitasnya dapat dilihat dengan menginvestasikan pendidikan akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat produktivitas kerja (Inda Arfa, 2017). Besar pembangunan suatu daerah juga dapat dilihat melalui besarnya nilai Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM juga menentukan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah.

Pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kualitas SDM, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pembangunan manusia (Oka dan Arka, 2015). Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata terdapat daerah dengan pembangunan yang cepat dan daerah dengan pembangunan yang lambat, dimana ketidakmerataan pembangunan akan berpengaruh buruk terhadap kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah (Hariwan dan Swaningrum, 2015). Berikut ini merupakan table 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

**Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2018 (dalam poin)**

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jembrana	68,39	68,67	69,66	70,38	70,72	71,65
Tabanan	72,31	72,68	73,54	74,19	74,86	75,45
Badung	77,63	77,98	78,86	79,80	80,54	80,87
Gianyar	74,00	74,29	75,03	75,70	76,09	76,61
Klungkung	68,08	68,30	68,98	69,31	70,13	70,90
Bangli	65,47	65,75	66,24	67,03	68,24	68,96
Karangasem	63,70	64,01	64,68	65,23	65,57	66,49
Buleleng	68,83	69,19	70,03	70,65	71,11	71,70
Denpasar	81,32	81,65	82,24	82,58	83,01	83,30

*Sumber: BPS Statistik Bali, 2019*

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa kabupaten/kota di Provinsi Bali merupakan suatu daerah yang berhasil melakukan peningkatan IPM. Meskipun demikian rata-rata pertumbuhan IPM cenderung rendah atau masih di bawah

angka 1 persen setiap tahunnya, maka dari itu pemerintah Provinsi Bali masih perlu melakukan pengembangan mutu modal manusia terutama dari segi pendidikan maupun tingkat upah yang ditetapkan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali agar rata-rata pertumbuhan IPM mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana Kota Denpasar menduduki peringkat tertinggi sementara Kabupaten Karangasem menduduki peringkat terendah dalam capaian mutu modal manusia Provinsi Bali.

Pengangguran menjadi masalah dalam pembangunan yang mempengaruhi (*Human Development Index*). Pengangguran juga dapat menjadi efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah pengangguran merupakan sebuah masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan seseorang. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk yang rendah kualitas SDM, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan pekerjaan (Matt Dickson, 2009).

Menurut Septiana dkk (2015) pendidikan yang lebih luas adalah modal manusia dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik, dimana kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan merupakan inti dari mencapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Peran gandanya sebagai *input* maupun

*output* menyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam mencapai kehidupan yang layak.

Sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi (Sulistiawati dan Rini, 2012). Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja. Peningkatan upah minimum akan meningkatkan kebutuhan hidup yang layak sehingga standar hidup layak juga mengalami peningkatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka terdapat beberapa rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pengaruh angka melek huruf dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Bali? (2) Bagaimanakah pengaruh angka melek huruf, upah minimum dan tingkat pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali? (3) Apakah tingkat pengangguran merupakan variabel *intervening* dari pengaruh angka melek huruf dan upah minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali?

Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis pengaruh angka melek huruf dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Bali. (2) Untuk menganalisis pengaruh angka melek huruf, upah minimum dan tingkat pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali. (3) Untuk menganalisis bahwa tingkat pengangguran sebagai variabel *intervening* dari pengaruh angka melek huruf dan

upah minimum terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

*Human Development Index* (HDI) merupakan komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, pendidikan dan standar hidup. Nilai indeks berkisaran 0-100, dimana HDI mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu daerah atau negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, pengetahuan dan suatu standar hidup yang layak.

### **Pengangguran**

Pengangguran merupakan keadaan seseorang dimana mereka tidak memiliki pekerjaan atau mereka sedang mencari pekerjaan secara aktif untuk mendapatkan pekerjaan (Hila Axelrad dkk., 2018). Angkatan kerja terdiri dari laki-laki maupun perempuan yang berusia 15-64 tahun. Pengangguran juga bisa disebabkan oleh masalah pendidikan (Sirilius Seran, 2017). Semakin besar tingkat pendidikan yang diterima oleh individu di daerah maka semakin besar kemungkinan mereka mencari pekerjaan di luar. Level yang lebih tinggi pendidikan memperluas pilihan migrasi individu, tidak hanya menawarkan upah yang lebih tinggi tetapi juga bagi mereka yang akan memastikan hak-hak mereka sebagai pekerja. Menurut Todaro dan Smith (2000: 254) literatur ekonomi sebelum *Great Depression* 1930 pengangguran biasanya dianggap sebagai kondisi yang tidak disesuaikan dari pasokan sementara dan permintaan pekerja.

### **Angka Melek Huruf (AMH)**

Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata adalah dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Tingkat melek huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Angka Melek Huruf (AMH) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Batas maksimum untuk angka melek huruf, adalah 100 sedangkan batas minimum 0 (standar UNDP). Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis dan nilai 0 mencerminkan kondisi sebaliknya. Angka melek huruf juga dapat menjadi indikator melihat perkembangan pendidikan penduduk. Semakin tinggi angka melek huruf atau kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM (Edi Dores, 2014).

### **Upah Minimum**

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerja. Upah yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah akan dilakukan (Nashahta dan Dewi, 2018). Tingkat upah dapat berbeda tergantung dari sektor mana tenaga kerja itu berada, letak geografis usaha, pendidikan dan

keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja, jenis kelamin, proporsi biaya tenaga kerja terhadap seluruh biaya produksi, proporsi keuntungan terhadap penjualan, skala organisasi, kelangkaan tenaga kerja, kekuatan serikat pekerja dan jenis jabatan.

### **Kerangka Konseptual**

Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi cenderung memiliki kemampuan ataupun keahlian yang beragam sehingga akan meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi masalah pengangguran (Trianggono dan Siti, 2017). Upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*Sustainable Development*), sektor pendidikan memainkan peranan sangat strategis yang dapat mendukung proses dan aktivitas ekonomi lainnya.

Menurut Mankiw (2000: 11) upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah daerah akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada di daerah tersebut. Semakin tinggi besarnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut (Alghofari dan Farid, 2010). Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu wilayah akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran, jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah atau wilayah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut (Nurhikmah Risvi, 2017).

Menurut Muhammad Nurcholis(2014) yakni hasilnya ada hubungan yang negatif antara kenaikan UMP dengan tingkat pengangguran. Ketika terjadi kenaikan upah minimum akan terjadinya berkurangnya pengangguran dengan kenaikan UMP tersebut. Keadaan ini bisa terjadi, dikarenakan ada beberapa kemungkinan diantaranya diduga tingkat upah ini berada dibawah titik keseimbangan, kemudian apabila upah semakin meningkat, ini diduga akan mendorong serta merangsang para pengangur untuk segera mencari pekerjaan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Pendidikan merupakan salah satu kunci seseorang dalam meningkatkan taraf kehidupannya. Dengan pendidikan seseorang dapat melakukan mobilitas sosial, seperti seseorang yang berasal dari golongan ke bawah dapat melakukan mobilitas menjadi golongan menengah ke atas karena pendidikan yang telah ditempuhnya sehingga memperoleh pekerjaan yang layak (Ela Nur dkk., 2018), dengan demikian pendidikan sangat mempengaruhi bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan upah minimum regional akan meningkatkan kebutuhan hidup layak sehingga standar hidup layak juga mengalami peningkatan yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah tangga. Akibat peningkatan upah minimum yang diterima, daya beli masyarakat mengalami peningkatan sehingga berdampak positif pada *human development index* (Amirul Zamharir, 2016).

Menurut Todaro (2000) dalam (Nofrian Eka, 2018) juga mengatakan bahwa Pembangunan Manusia merupakan tujuan pembangunan yang memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran untuk melakukan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dengan diatasi jumlah pengangguran dan mendapatkan pendapatan yang tinggi maka akan berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan bagian pengeluaran rumah tangga yang dibelanjakan untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan yang lebih tinggi.

Menurut Sukirno, (2011: 68), dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang pengangguran dari tahun ke tahun semakin lama bertambah serius. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang telah di capai seseorang. Menurut Siti Nur (2018) pengangguran, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, jumlah pengangguran yang tinggi akan mengakibatkan kemakmuran kehidupan masyarakat berkurang dan pengangguran juga mengakibatkan pendapatan mereka berkurang, pendapatan dalam hal ini merupakan faktor yang dominan dalam peningkatan IPM.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada

filsafat positivis, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan (Sugiyono, 2017:23).

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, yaitu observasi yang dilakukan tanpa melibatkan diri dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2017: 232). Memperoleh data dengan metode ini dapat dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan serta mempelajari uraian-uraian dari buku-buku, jurnal-jurnal, situs internet, skripsi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti guna memperoleh dasar teoritis dan acuan untuk memperoleh data.

### **Jumlah Pengamatan**

Titik pengamatan dalam penelitian ini ada di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam rentang waktu 2013 hingga 2018 (6 tahun) maka besarnya ukuran sampel adalah *series* dan *cross section*.  $6 \times 9 = 54$  pengamatan dengan mengkombinasikan data *time*

### **Teknik Analisis Data**

#### **Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah perhitungan minimum, maximum, mean dan standar deviasi (Sugiyono, 2017: 232).

### **Analisis Jalur**

Analisis jalur (*path analysis*) merupakan perluasan penerapan analisis regresi linier berganda untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel (model kasual) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Model ini dipertimbangkan untuk digunakan dalam suatu penelitian apabila hubungan yang dianalisis merupakan hubungan sebab akibat dengan model yang kompleks, dalam analisis jalur terdapat suatu variabel yang berperan ganda yaitu sebagai variabel independen pada suatu hubungan, namun menjadi variabel mediasi atau *intervening*. Adanya hubungan yang kompleks tersebut membutuhkan alat analisis jalur akan dapat dihitung pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel (Utama, 2016: 159).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

**Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif Angka Melek HurufIndeks, Upah Minimum Provinsi, Tingkat Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia.**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AMH	54	79.11	98.70	91.0594	5.08272
UMK	54	1182000	2499581	1791109.37	341863.050
T. Pengangguran	54	.34	3.54	1.5987	.80367
IPM	54	63.70	83.30	72.4552	5.55388
Valid N (listwise)	54				

*Sumber: Hasil Olahan Data, 2019*

Bersadarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa variabel AMH ( $X_1$ ) memiliki nilai minimum sebesar 79,11 persen, nilai maximum sebesar 98,70 persen dengan rata-rata 91,0594 persen dan standar deviasi sebesar 5,08272 persen. Variabel UMK( $X_2$ ) memiliki nilai minimum 1.182.000 ribu rupiah, nilai maximum sebesar 2.499.581 ribu rupiah dengan rata-rata 1.791.109,37 ribu rupiah dan standar deviasi sebesar 341.863,050 ribu rupiah. Variabel Tingkat Pengangguran ( $Y_1$ ) memiliki nilai minimum sebesar 0,34 persen, nilai maximum sebesar 3,54 persen dengan rata-rata 1,5987 persen dan standar deviasi sebesar 0,80367 persen. Variabel IPM ( $Y_2$ ) memiliki nilai minimum sebesar 63,70 poin, nilai maximum sebesar 83.30 poin dengan rata-rata 72,4552 poin dan standar deviasi sebesar 5,55388 poin.

### **Hasil Regresi Pengaruh Angka Melek Hurufdan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.**

- 1) Persamaan regresi sub struktural I

Pengujian hubungan substruktural I dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung variabel angka melek huruf dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil persamaan regresi ditunjukkan sebagai berikut.

$$Y_1 = 0,299X_1 - 0,387X_2 + e_1$$

$$S_b = (0,021) \quad (0,310) \quad R^2 = 0,178$$

$$t = (2,269) \quad (-2,936) \quad F = 5,510$$

$$\text{sig} = (0,028) \quad (0,005)$$

$$F_{\text{tabel}} = (k-1) (n-k) \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

k = jumlah variabel bebas

n = jumlah sampel penelitian

Keterangan:

k = jumlah variabel bebas

n = jumlah sampel penelitian

$$F_{\text{tabel}} = (k-1) (n-k)$$

$$F_{\text{tabel}} = (2-1) (54-2)$$

$$F_{\text{tabel}} = (1)(54)$$

$$F_{\text{tabel}} = 4,03$$

2) Pengujian signifikansi persamaan regresi substruktura I

**Tabel 3. Ringkasan Koefisien Jalur Substruktural I**

Regresi	Koe. Reg Standar	t hitung	P. Value/sig.	Keterangan
$X_1 \rightarrow Y_1$	0,299	2,269	0,028	Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_1$	-0,387	-2,936	0,005	Signifikan

Sumber: Hasil Olahan Data, 2019

Keterangan:

$X_1$  = angka melek huruf

$X_2$  = upah minimum

$Y_1$  = tingkat pengangguran

Berdasarkan persamaan regresi struktural I,  $F_{hitung}$  menunjukkan angka sebesar 5,510 dengan  $F_{tabel}$  sebesar 4,03.  $F_{hitung} 5,510 > 4,03$  artinya bahwa model regresi yang diestimasi dari variabel angka melek huruf, upah minimum dan tingkat pengangguran sudah layak (*fit*).

**Pengaruh Angka Melek Huruf, Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali**

1) Persamaan regresi sub struktural II

Pengujian hubungan substruktural II dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung variabel angka melek huruf, upah minimum dan tingkat pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil persamaan regresi ditunjukkan sebagai berikut.

$$Y_2 = 0,807X_1 + 0,172X_2 + 0,000Y_1 + e_2$$

$$Sb = (0,083) \quad (1,278) \quad (0,535) \quad R^2 = 0,754$$

$$t = (10,576) \quad (2,187) \quad (-0,005) \quad F = 51,086$$

$$sig = (0,000) \quad (0,033) \quad (0,996)$$

$$F_{tabel} = (k-1) (n-k) \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

k = Jumlah variabel bebas

n = jumlah sampel penelitian

$$F_{tabel} = (k-1) (n-k)$$

$$F_{tabel} = (2-1) (54-2)$$

$$F_{tabel} = (1)(54)$$

$$F_{tabel} = 4,03$$

2) Pengujian signifikansi persamaan regresi substruktura II

**Tabel 4. Ringkasan Koefisien Jalur Substruktural II**

Regresi	Koe. Reg Standar	t hitung	P. Value/sig.	Keterangan
$X_1 \rightarrow Y_2$	0,807	10,576	0,000	Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_2$	0,172	2,187	0,033	Signifikan
$Y_1 \rightarrow Y_2$	0,000	-0,005	0,996	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil Olahan Data, 2019

Keterangan:

$X_1$  = angka melek huruf

$X_2$  = upah minimum

$Y_1$  = tingkat pengangguran

$Y_2$  = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan persamaan regresi struktural II,  $F_{hitung}$  menunjukkan angka sebesar 51,086 dengan  $F_{tabel}$  sebesar 4,03.  $F_{hitung} 51,086 > 4,03$ , artinya bahwa model regresi yang diestimasi dari variabel angka melek huruf, upah minimum dan tingkat pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia sudah layak (*fit*).

**Nilai Kekeliruan Taksiran Standar (*Standar Error of Estimate*)**

Mengetahui nilai  $e_1$  yang menunjukkan jumlah variance variabel tingkat pengangguran yang tidak dijelaskan oleh angka melek huruf dan upah minimum dihitung menggunakan rumus:

$$e_1 = \sqrt{(1 - R^2)} \dots \dots \dots (3)$$

$$e_1 = \sqrt{(1 - 0,178)}$$

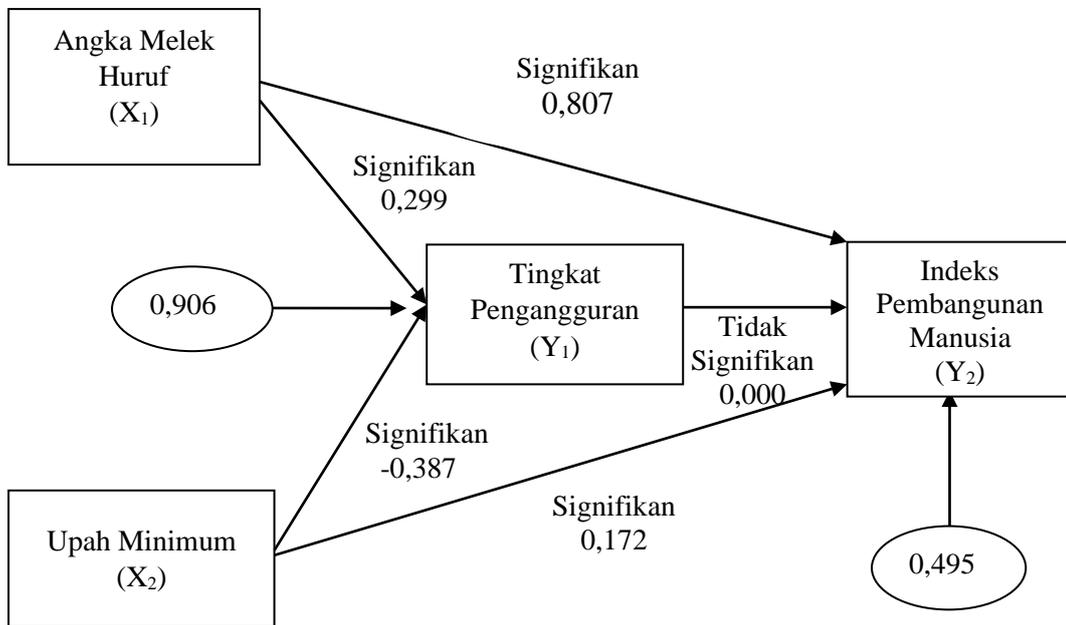
$$e_1 = 0,906$$

Sedangkan untuk nilai  $e_2$  yang menunjukkan variance variabel indeks pembangunan manusia yang dijelaskan oleh variabel angka melek huruf, upah minimum dan tingkat pengangguran dihitung menggunakan rumus:

$$e_2 = \sqrt{(1 - R^2)} \dots\dots\dots(4)$$

$$e_2 = \sqrt{(1 - 0,754)}$$

$$e_2 = 0,495$$



**Gambar1. Koefisien Jalur Hubungan AntarVariabel**

**Pemeriksa Validitas Model**

Memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan yaitu koefisien determinasi total hasilnya sebagai berikut:

$$R^2m = 1 - (e_1)^2(e_2)^2 \dots\dots\dots(5)$$

$$R^2m = 1 - (0,906)^2(0,495)^2$$

$$R^2m = 1 - (0,820) (0,245)$$

$$R^2m = 1 - (0,2009)$$

$$R^2_m = 0,7991$$

Keterangan:

$R^2_m$  = koefisien determinasi

$e_1, e_2$  = nilai kekeliruan taksiran standar

Berdasarkan hasil hitung koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model sebesar 79,91 persen atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 79,91 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan 20,09 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

### **Pengujian Pengaruh Langsung**

- 1) Pengaruh langsung angka melek huruf ( $X_1$ ) terhadap tingkat pengangguran ( $Y_1$ ) kabupten/kota di Provinsi Bali.

Nilai *standardized coefficients Beta* sebesar 0,299 dengan sig 0,028 <0,05 maka  $H_1$  diterima, ini menunjukkan bahwa angka melek huruf berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hubungan positif signifikan antara variabel tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran sesuai dengan penelitian Suaidah dan Hendry (2013). Hubungan positif dan signifikan antara variabel tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran sesuai dengan penelitian Trianggono dan Siti (2017). Menurut Fitri Wahyu (2019) Hal ini disebabkan seseorang yang berpendidikan tinggi cenderung akan lebih selektif dalam mencari pekerjaan dan terkadang memiliki standar yang tinggi terhadap salary atau gaji yang akan didapatkan. Sementara mereka yang tidak tergolong dalam pengangguran terdidik cenderung lebih menerima pekerjaan yang ada dan

tidak menaruh target yang tinggi sehingga mau melakukan dan mengambil pekerjaan yang ada.

- 2) Pengaruh langsung upah minimum ( $X_2$ ) terhadap tingkat pengangguran ( $Y_1$ ) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Nilai *standardized coefficients Beta* sebesar -0,387 dengan sig 0,005 < 0,05 maka  $H_1$  diterima, ini menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Bali. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa upah (UMP) mempunyai hubungan yang negatif dan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran sesuai penelitian Nirmala Mansur dkk (2014). Dari hasil yang diperoleh, ketika terjadi kenaikan upah minimum dari tahun ke tahun ini ternyata juga akan mendukung bahwa pengangguran akan berkurang dengan kenaikan UMP. Keadaan ini bisa terjadi, dikarenakan ada beberapa kemungkinan diantaranya pertama, diduga titik kenaikan tingkat upah ini berada dibawah titik keseimbangan, kemudian apabila upah semakin meningkat, ini diduga akan mendorong serta merangsang para pengangur untuk segera mencari pekerjaan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Selain itu penelitian ini sesuai dengan penelitian (Nurhikmah Risvi, 2017) yakni hasilnya ada hubungan negatif dan signifikan antara upah minimum regional terhadap pengangguran. Nilai upah minimum regional, dapat dinyatakan bahwa setiap peningkatan upah minimum regional menyebabkan penurunan pengangguran. Menurut (Mankiw, 2000: 129), bahwa alasan adanya pengangguran merupakan gagalnya upah yang melakukan penyesuaian sampai

penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Upah yang rendah mendorong perusahaan lebih banyak menggunakan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.

- 3) Pengaruh langsung angka melek huruf ( $X_1$ ) terhadap indeks pembangunan manusia ( $Y_2$ ) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Nilai *standardized coefficients Beta* sebesar 0,807 dengan sig 0,000 <0,05 maka  $H_1$  diterima, ini menunjukkan bahwa angka melek huruf berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sesuai penelitian (Ela Nur dkk., 2018). Hubungan positif antara variabel tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan dikarenakan bahwa dalam mengukur kesejahteraan seseorang dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kesejahteraan salah satunya adalah melalui pendidikan. Dalam Koller, pendidikan ini masuk ke dalam segi mental dan spiritual dalam mengukur tingkat kesejahteraan seseorang. Fenomena yang terjadi dalam jenjang pendidikan yang ditempuh oleh mayoritas penduduk kelurahan Kesatrian adalah jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas. Namun, karena memang sebagian besar berprofesi sebagai tentara dan mobilisasi yang sangat cepat karena berkaitan dengan tugas negara yang mereka emban maka tidak mengherankan meskipun lulusan SMA memiliki gaji setara dengan S1 bahkan lebih. Setelah lulus SMA, mereka diwajibkan bagi yang masuk militer untuk pendidikan tentara dengan

jangka waktu tertentu, hal ini lah yang kemudian menjadikan lulusan tingkat SMA lebih banyak.

- 4) Pengaruh upah minimum ( $X_2$ ) terhadap indeks pembangunan manusia ( $Y_2$ ) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Nilai *standardized coefficients Beta* sebesar 0,172 dengan sig 0,033 < 0,05 maka  $H_1$  diterima, ini menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hubungan positif dan signifikan antara variabel upah minimum terhadap *human development index* sesuai dengan penelitian (Amirul Zamharir, 2016). Peningkatan upah minimum di 12 provinsi Indonesia dengan dikategori *lower medium* akan meningkatkan kebutuhan hidup layak sehingga standar hidup layak juga mengalami peningkatan. Upah (*wage*) adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah telah terlibat dalam menangani masalah pengupahan melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat 1, disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu alasan ditetapkannya upah minimum adalah sebagai jaring pengaman sosial untuk memastikan upah tidak merosot serta mempersempit kesenjangan ekonomi. Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yang kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah tangga.

- 5) Pengaruh tingkat pengangguran ( $Y_1$ ) terhadap indeks pembangunan manusia ( $Y_2$ ) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Nilai *standardized coefficients Beta* sebesar 0,000 dengan sig 0,996 >0,05 maka  $H_0$  ditolak, ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengaruh positif pengangguran terhadap IPM sesuai dengan penelitian (Aries Suganda, 2019), bahwa ketika pengangguran meningkat maka kesejahteraan masyarakat juga meningkat, sedangkan pengangguran tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia sesuai dengan penelitian (Nofrian Eka, 2018).

Penyebab pengangguran tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dikarenakan apabila IPM dilihat dari segi pendidikan memang tinggi, akan tetapi jenjang pendidikan ini masih kurang dihargai dibandingkan pengalaman atau jam terbang dalam dunia kerja, sehingga kalau IPM tinggi, akan tetapi pengalaman kerja kurang atau tidak bekerja maka orang yang tidak bekerja akan semakin bertambah alias pengangguran juga akan bertambah. Pada dasarnya pengangguran biasa dilihat dari dua sisi, sisi yang pertama adalah setengah menganggur ke antara yakni mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, sisi ke dua sebagai setengah menganggur tidak kentara yaitu mereka yang produktivitas kerja dan pendapatannya rendah.

### **Uji Sobel**

- 1) Tingkat pengangguran ( $Y_1$ ) sebagai variabel *intervening* dari pengaruh angka melek huruf ( $X_1$ ) terhadap indeks pembangunan manusia ( $Y_2$ ) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Untuk mengetahui tingkat pengangguran sebagai variabel *intervening* dari pengaruh angka melek huruf terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat dihitung dengan rumus:

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{\beta_{52}S_{\beta_{12}} + \beta_{12}S_{\beta_{52}}} \dots\dots\dots(6)$$

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{(-0,003)^2(0,021)^2 + (0,047)^2 (0,535)^2}$$

$$S_{\beta_1\beta_5} = 0,0251$$

Berdasarkan perhitungan koefisien  $S_{\beta_1\beta_5}$  maka untuk menguji signifikansi variabel *intervening* harus menghitung nilai z dari koefisien  $S_{\beta_1\beta_5}$  dengan rumus sebagai berikut.

$$Z = \frac{\beta_1\beta_5}{S_{\beta_1\beta_5}} \dots\dots\dots(7)$$

$$Z = \frac{(0,047)(-0,003)}{0,0251}$$

$$Z = -0,0056$$

Oleh karena Z hitung sebesar  $-0,0056 < 1,96$  Artinya tingkat pengangguran merupakan bukan variabel *intervening* angka melek huruf ( $X_1$ ) terhadap indeks pembangunan manusia ( $Y_2$ ) kabupaten/kota di Provinsi Bali atau dengan kata lain angka melek huruf tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap indeks pembangunan manusia melalui tingkat pengangguran.

Besarnya pengaruh tidak langsung antara variabel angka melek huruf terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali melalui tingkat pengangguran dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned} X_1 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2 &= (a_1 \times b) \dots\dots\dots (8) \\ &= (0,047 \times (-0,003)) \\ &= -0,0001 \end{aligned}$$

Nilai sebesar  $-0,0001$  mempunyai arti bahwa pengaruh tidak langsung angka melek huruf terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali melalui tingkat pengangguran adalah sebesar  $-0,0001$  persen

2) Tingkat pengangguran ( $Y_1$ ) sebagai variabel *intervening* dari pengaruh upah minimum ( $X_2$ ) terhadap indeks pembangunan manusia ( $Y_2$ ) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Untuk mengetahui Tingkat Pengangguran sebagai variabel *intervening* dari pengaruh upah minimum terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned} S_{\beta_2\beta_5} &= \sqrt{\beta_{52}^2 S_{\beta_2^2} + \beta_{22}^2 S_{\beta_5^2}} \dots\dots\dots (9) \\ S_{\beta_2\beta_5} &= \sqrt{(-0,003)^2 (0,310)^2 + (-0,909)^2 (0,535)^2} \\ S_{\beta_2\beta_5} &= 0,4863158892 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan koefisien  $S_{\beta_2\beta_5}$  maka untuk menguji signifikansi variabel *intervening* harus menghitung nilai z dari koefisien  $S_{\beta_2\beta_5}$  dengan rumus sebagai berikut.

$$Z = \frac{\beta_2\beta_5}{S_{\beta_2\beta_5}} \dots\dots\dots (10)$$

$$Z = \frac{(0,909)(-0,003)}{0,2365}$$

$$Z = 0,0115$$

Oleh karena Z hitung sebesar  $0,0115 > 1,96$  Artinya tingkat pengangguran merupakan bukan variabel *intervening* upah minimum ( $X_2$ ) terhadap indeks pembangunan manusia ( $Y_2$ ) kabupaten/kota di Provinsi Bali atau dengan kata lain upah minimum tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap indeks pembangunan manusia melalui tingkat pengangguran.

Besarnya pengaruh tidak langsung antara variabel upah minimum terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali melalui tingkat pengangguran dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned} X_1 \longrightarrow Y_1 \longrightarrow Y_2 &= (a_1 \times b) \dots \dots \dots (11) \\ &= (-0,909 \times -0,003) \\ &= 0,002 \end{aligned}$$

Nilai sebesar 0,002 mempunyai arti bahwa pengaruh tidak langsung upah minimum terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali melalui tingkat pengangguran adalah sebesar 0,002 persen.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan. Angka Melek Huruf (AMH) secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Bali, sedangkan Upah Minimum (UMP) secara langsung berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Bali. Angka

Melek Huruf (AMH) secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Bali. Upah Minimum (UMP) secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Bali, sedangkan Tingkat Pengangguran secara langsung berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali. Tingkat Pengangguran bukan sebagai variabel *intervening* dari variabel Angka Melek Huruf (AMH) dan Upah Minimum (UMP) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Melihat besarnya pengaruh angka melek huruf terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali, diharapkan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat lebih meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan oleh pemerintah di sektor pendidikan dapat ditingkatkan dengan beberapa hal antara lain dengan memberikan bantuan-bantuan pendidikan berupa dana beasiswa kepada siswa kurang mampu ataupun siswa berprestasi, menambah fasilitas-fasilitas pendidikan seperti buku-buku bacaan, kurikulum yang baik di setiap institusi pendidikan yang ada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Melihat besarnya pengaruh upah minimum terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali, diharapkan pemerintah dapat memperhatikan tingkat upah yang ditetapkan pada setiap kabupaten/kota sehingga dapat meningkatkan rata-rata pertumbuhan indeks pembangunan manusia bagi kabupaten/kota di Provinsi Bali yang rata-rata pertumbuhan indeks pembangunan manusianya masih rendah.

## REFRENSI

- Alghofari Farid. (2010). Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007. *Skripsi*.
- Aries Suganda. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Periode 2012-2016). *Jurnal Ekonomi Daerah (Jeda)*. Vol. 7, No.1.
- Amirul Zamharir. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, PDRB Perkapita, dan Upah Minimum Terhadap Human Development Index: Studi Kasus 12 Provinsi Dengan Kategori Lower Medium di Indonesia. *Skripsi*.
- Edi Dores. (2014). Pengaruh Angka Melek Huruf dan Angka Harapan Hidup Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatra Barat. *Journal of Economic and Economic Education*. Vol.2 No.2 (126 - 133).
- Ela Nur Aini, Ifa Isnaini & Sri Sukanti. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kesatrian Kota Malang. *Technomedia Journal (TMJ)*. Vol.3 No.1, E-ISSN: 2528 – 6544.
- Edyson Susanto, Eny Rochaida & Yana Ulfah. (2017). Pengaruh inflasi dan Pendidikan Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan. *INOVASI*. Volume 13 (1), 19-27, ISSN: 2528-1097.
- Fitri Wahyu. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pendidikan Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*.
- Hariwan Peggy & Swaningrum Ayu. (2015). Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 8 No. 1: 72-82. ISSN: 2301-8968.
- Hila Axelrad, Miki Malul & Israel Luski. (2018). Unemployment Among Younger and Older Individuals: Does Conventional Data About Unemployment Tell Us the Whole Story. *Journal for Labour Market Research*. <https://doi.org/10.1186/s12651-018-0237-9>.
- Inda Arfa Syera. (2017). The Effect of Unemployment Rate, Human Development Index, Gross Domestic Product against Level of Poverty in Indonesia. *Economics Department, State University of Medan, North Sumatera, Indonesia*.
- Matt Dickson. (2009). The Causal Effect of Education on Wages Revisited. *IZA Discussion Paper*. No. 4419, Institute for the Study of Labor (IZA).

- Marhaeni A.A.I.N & Manuati I.G.A, (2004). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Fakultas Ekonomi Universita Udayana.
- Mankiw, N. Greorgy. (2000). *Teori Makor Ekonomi*. Edisi Keempat. Alih Bahasa: Imam Nurmawam. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad Nurcholis. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014. *Jurnal Pembangunan*. Vol 12 No. 1 Juni 2014.
- Nashahta Ardhiaty Nurfiat & Dewi Rustariyuni Surya. (2018). Pengaruh Upah dan Teknologi Terhadap Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel di Kota Denpasar. *PIRAMIDA*. Vol. XIV No. 1: 34 – 48. ISSN: 1907-3275.
- Nurhikmah Risvi Said. (2017). Pengaruh Upah Minimum Regional, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Kota Makassar. *Skripsi*.
- Nofrian Eka Putra. (2018). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi Tahun 2011-2015. *Skripsi*.
- Nirmala Mansur, Daisy Engka dan Steeva Tumangkeng. (2014). Analisis Upah Terhadap Pangaangguran di Kota Manado Tahun 2003-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 14 No. 2 - Mei 2014.
- Oka Artana Yasa I Komang & Arka Sudarsana. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 8 No. 1: 63 – 71. ISSN: 2301-8968.
- Septiana M. M. Sanggelorang, Vekie A. Rumat & Hanly F.Dj. Siwu. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 15, No. 02.
- Suaidah Imarotus & Hendry Cahyono. (2013). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jombang. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*.1 (3).
- Sulistiawati & Rini. (2012). Pengaruh Upah Minimum Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Social*. Volume 8. Nomor 3, Hal: 195-211.

Sukirno Sadono. (2011). *Pengantar Teori Makroekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sirilius Seran. (2017). Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 10 No. 2: 59 – 71. ISSN: 2303-0186.

Siti Nur Fatimah. (2018). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi*.

Todaro Michael P & Stephen C. Smith. (2000). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1*. Edisi Kesembilan, Jakarta: Erlangga.

Tutik Yuliani & Novita Saragih. (2014). Determinan Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Economics and Policy*. 60-72, ISSN 1979-715.

Trianggono Budi Hartanto & Siti Umajah Masjkur. (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Jumlah Pengangguran di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*. 02(1): 21-30, ISSN 2541-1470.

Utama Made Suyana. (2016). *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: Cv. Sastra Utama.